

**PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN
DI SEKITAR INDUSTRI PERTAMBANGAN ;
Di Desa Manduin, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong¹**

***(POOR FAMILY EMPOWERMENT IN MINING INDUSTRY;
in Manduin village, District Muara Harus, Municipality Tabalong)***

Gunawan²

Abstrak

Berbagai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia telah dilaksanakan selama beberapa dekade, namun jumlah warga miskin relatif masih cukup banyak. Keberadaan mereka tersebar di berbagai daerah, yang secara geografis dibedakan ke dalam delapan karakter wilayah antara lain mereka yang berdomisili di sekitar industri pertambangan. Pemberdayaan Keluarga Miskin di sekitar Industri Pertambangan merupakan penelitian kaji laksana dengan pendekatan partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep model pemberdayaan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Data dan informasi dihimpun dari tiga unsur (Public sector; privat sektor, collective action sector) dengan Observasi, diskusi kelompok, wawancara, dan dokumentasi. Dari analisis kualitatif terhadap data dan informasi yang terhimpun di Desa Manduin, diketahui bahwa (1) secara implisit program anti kemiskinan telah terakomodasi dalam pengelolaan industri. (2) pemerintah dan dunia usaha telah ada kesamaan persepsi dan komitmen, namun di tingkat implementasinya masih belum berjalan secara sinergis. (3) dalam praktik pemberdayaan pendekatan yang sifatnya charity dapat berdampak ketergantungan kepada pemberi bantuan (4) optimalisasi dari hasil usaha pengembangan sosial ekonomi mengutamakan produk lokal unggulan (5) idealnya pemberdayaan keluarga miskin dilaksanakan secara komprehensif (menyeluruh) dengan pemberdayaan masyarakat. Dari hasil analisis tersebut Penelitian ini telah menemukan rumusan model pemberdayaan keluarga miskin di sekitar industri pertambangan.

Kata kunci: pemberdayaan, keluarga, industri pertambangan

Abstract

Indonesia has conducted varies of efforts in order to overcome poverty problems with in last few decades. However the population of poor still amount. Those poors are seen in several areas, that geographically are distingwisled in several characters. One among them is poor who stay in mining area. Empowering poor family in mining area is an action research that using participative approach. This research has aimed to gain a model of empowerment that match to local environment. Data and information have been collected from three elements (public sector; private sector, and collective sector) by observation, interview, and documentive study. Based on qualitative analysis of collected data and information in Manduin Village, indicated that (1) implicitly anti poverty program has accommodated in industry management; (2) local government and mining industry have had similar perception and commitment, event there is not smooth in implementation; (3) in empowerment practice, charity causes dependable; (4) optimizing the profit of their business are using local product; (5) ideally, empowerment should be integrated and comprehensive. Based on the research , it has been formulated empowerment model in mining areas.

Keywords: empowerment, household, mining industry;

¹ Naskah ini diangkat dari penelitian yang didanai dengan APBN melalui Program Insentif Peneliti dan Perekayasa Kementerian Riset dan Teknologi tahun 2011. Tim Peneliti terdiri dari Gunawan, Nina Karinina, Sri Gati Setiti, Hartiyati Roebyanto, dan Suyanto.

² Gunawan lahir di Yogyakarta 12 April 1956. menamatkan S1 di Fisipol UGM, Peneliti pada Puslitbang Kesos, Badiklit, Kementerian Sosial. E-mail:gun_prawiro@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan seperti: seminar, penelitian, maupun tindakan/program penanggulangan kemiskinan mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah telah dilaksanakan. Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Pengembangan Prasarana Pedesaan, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), dan lain lain. Dari pendekatan kelompok seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (KUPPKS), kelompok keluarga mandiri (KMM) telah menghasilkan ribuan kelompok usaha. Alokasi dana untuk penanggulangan kemiskinan telah mencapai angka lebih dari 12 digit (trilyunan rupiah). Jika dicermati, hasil yang telah dicapai dari program penanganan kemiskinan tersebut masih belum optimal. Angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong besar. Kondisi ini tercermin dari “fluktuasi” persentase kemiskinan, bahwa dekade 1976-1996, persentase penduduk miskin pernah mengalami penurunan yaitu dari 40,1% menjadi 11,3%; pada periode 1996-1998 persentase mereka menjadi 24,29% atau 49,5 juta jiwa. Bahkan International Labour Organization (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 129,6 juta atau sekitar 66,3% (BPS, 1999). Pada tahun 2002, persentase kemiskinan telah mengalami penurunan, namun secara absolut jumlah mereka masih tergolong tinggi, yaitu 43% atau sekitar 15,6 juta (BPS dan Depsos 2002). Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, jumlah keluarga miskin memang sudah banyak yang telah terolong dengan berbagai program, namun secara absolut jumlah penduduk miskin masih tergolong tinggi. BPS (2008) menyebutkan, bahwa jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang (15,58 persen). Dibandingkan dengan penduduk

miskin pada bulan Maret 2007 yang berjumlah 37,17 juta (BPS 2008). Berarti jumlah penduduk miskin turun sebanyak 2,21 juta orang. Dalam Media Indonesia (Senin 22 November 2010) diungkapkan bahwa krisis ekonomi global disusul dengan penanganan pemulihan yang lambat menyebabkan jumlah orang miskin menjadi 64 juta orang pada penghujung tahun ini jumlah orang miskin membengkak bila dibandingkan dengan 2009. Pada tahun tersebut akibat krisis sekitar 50 juta orang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem. Mereka adalah yang berpendapatan di bawah \$Us 1,25 perhari (Rp.12,250), bahkan menurut Bank Dunia, walaupun pemulihan ekonomi bisa dipercepat, sebanyak 71 juta orang akan tetap hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem pada 2020. Di Indonesia sendiri per Maret 2010 sebanyak 13,3% penduduk atau 32,02 juta orang tergolong miskin. Jumlah tersebut menurun tipis bila dibandingkan dengan Maret 2007 yang sebanyak 14,5% atau 32,53 juta orang. Mereka adalah kelompok orang yang berpendapatan lebih rendah dari Rp.211.726 perkapita perbulan.

Dalam kerangka optimalisasi hasil dari sebuah program anti kemiskinan, potensi lokal merupakan faktor penting. Inventarisasi potensi dan peluang dimana warga masyarakat miskin tersebut berada sangat diperlukan. Upaya ini dimaksudkan untuk memperoleh kesesuaian karakteristik wilayah dengan model yang diperlukan. Karakteristik wilayah dimaksud antara lain: (1) Pegunungan, (2) Pedesaan, (3) wilayah sub-urban, (4) wilayah Perkotaan (5) pesisir, (6) industri, (7) hutan, (8) wilayah perbatasan. Berdasar karakteristik wilayah permukiman tersebut, maka permasalahan yang dijadikan pokok bahasan dalam pemberdayaan ini lebih menekankan pada salah satu karakteristik wilayah, yakni wilayah yang dijadikan konsentrasi industri khususnya Industri Pertambangan.

Industrialisasi (termasuk industri pertambangan) telah dijadikan alternatif pilihan untuk peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam pengelolaan industri pertambangan, tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi, baik dari segi modal maupun sumber daya manusia pelaksanaannya. Menurut Soetrisno (1995) industrialisasi dan prosesnya dalam masyarakat bukanlah suatu hal yang sederhana, tidak hanya menyangkut kemampuan pemerintah atau kekuatan ekonomi lain yang ada dalam suatu masyarakat untuk mendirikan suatu industri secara fisik dalam masyarakat. Namun lebih dari itu, industri membutuhkan kesiapan sosial budaya dari masyarakat untuk menerima, mendukung, serta melestarikan keberadaan fisik suatu industri di tengah masyarakat. Bahkan justru kesiapan sosial budaya ini merupakan faktor terpenting penunjang lajunya proses industrialisasi dalam suatu masyarakat.

Dari serangkaian proses beserta persyaratan tersebut, apakah masyarakat miskin, berpendidikan rendah dan keterampilan yang dimiliki lebih lekat dengan sektor agraris ini mendapat tempat dalam implementasi kebijakan tersebut? Ditinjau dari aspek sosial (kondisi sumber daya manusia) yang tersedia di sekitar Industri, realisasi dari pengembangan industri tersebut belum diperoleh manfaat secara optimal. Dalam kerangka pengembangan industri, paling tidak terdapat dua tuntutan yang sangat mendasar dan tidak dapat dihindari. Tuntutan kebutuhan tersebut adalah (1) di satu sisi, pengembangan industri membutuhkan ketersediaan lahan dan kualitas sumber daya manusia (SDM), (2) di sisi lain masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan karena semakin sempitnya areal lahan untuk kegiatan di sektor agraris.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) bumi dan air dan kekayaan alam

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam kerangka realisasi undang-undang dasar tersebut telah diterbitkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Klausul dalam pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No 4 tahun 2009 dan pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2010 menegaskan bahwa Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyusun Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Selanjutnya dalam pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 23/2010 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur dengan peraturan menteri.

Uraian di atas menunjukkan bahwa sektor sosial telah terakomodasikan dalam kebijakan pengembangan industri khususnya industri pertambangan. Informasi tentang ketentuan dimaksud tentunya sangat menjanjikan untuk peningkatan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat khususnya bagi keluarga miskin, namun secara khusus belum ada kementerian yang ditunjuk untuk mengatur implementasi kebijakan tersebut. Persoalannya adalah bagaimana model pemberdayaan yang mampu mengatasi permasalahan keluarga miskin di sekitar industri pertambangan.

Secara prinsip aktor utama dalam pemberdayaan adalah perorangan dan atau lembaga. Hal ini mengisyaratkan bahwa aplikasi dari konsep pemberdayaan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif. Konsep dasar dalam pendekatan ini

menegaskan bahwa berhasil atau tidaknya suatu kegiatan pemberdayaan sangat ditentukan oleh efektifitas partisipasi sosial masyarakat. Artinya partisipasi aktif dari keluarga miskin merupakan faktor penentu keberhasilan setiap program anti kemiskinan. Komisi Brundland dalam Clark (1996) mengemukakan, bahwa salah satu prasyarat utama terjadinya pembangunan berkelanjutan adalah menjamin efektifitas partisipasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan, bahwa partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya sekedar mengikuti kegiatan yang telah diprogramkan, tetapi lebih bersifat menyeluruh mulai dari penentuan/perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemanfaatan hasil suatu kegiatan.

Pengertian partisipasi dalam Davis Keith (1967) dikemukakan: *participation is defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them.* Dalam pengertian ini terdapat tiga unsur yang dapat dijadikan untuk melihat partisipasi yakni: (1) Keterlibatan mental dan emosi seseorang yang lebih dari pada sekedar keterlibatan fisik; (2) Memotivasi orang-orang untuk mendukung situasi kelompoknya, dalam arti mereka menyumbangkan inisiatifnya untuk mencapai sasaran kelompok; (3) Mendorong orang untuk merasa ikut serta bertanggung jawab atas aktivitas kelompok.

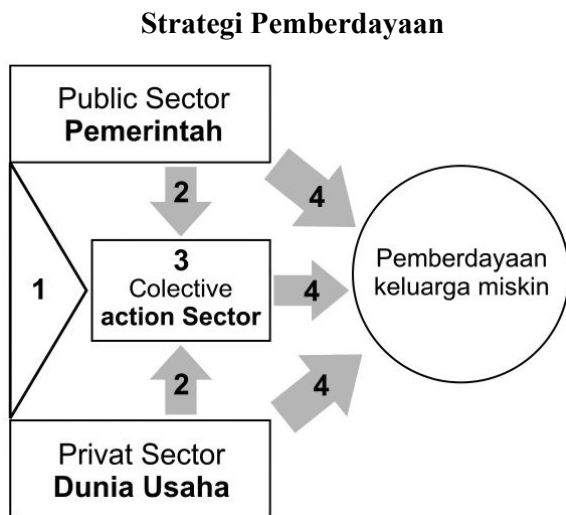
Secara instrumental Ndraha (1990) mengemukakan bahwa bentuk-bentuk partisipasi dapat dikelompokkan dalam 5 bentuk dukungan, yakni: 1) partisipasi buah pikiran, 2) partisipasi keterampilan. 3) partisipasi tenaga, 4) partisipasi harta benda, 5) partisipasi uang. Berkaitan dengan hal ini, Slamet (1992) mengemukakan, bahwa tujuan akhir dari partisipasi yang fundamental adalah berwatak non material dan kualitatif yang

tercermin dalam struktur sosial, ekonomi yang tidak diskriminatif.

Berdasar dari uraian di atas, secara implisit dapat dikemukakan bahwa, keberhasilan pemberdayaan pada penelitian ini dapat dilihat dari terjadinya sikap partisipatif dari seluruh unsur yang terkait dalam program pemberdayaan. Sikap atau attitude pada dasarnya merupakan suatu respon (tanggapan) baik secara individual maupun kolektif (sosial) atas suatu objek, situasi dan kondisi tertentu disekitarnya. Menurut Isbandi (1994) sikap individual adalah sikap yang diyakini oleh individu tertentu, sedangkan sikap sosial (kolektif) adalah sikap yang diyakini (dianut) oleh sekelompok orang terhadap suatu objek. Adapun manifestasi dari sikap (baik individual maupun kolektif) terdapat dua bentuk yakni berupa dukungan atau penolakan. Hal ini tercermin dari pengertian yang dikemukakan oleh Abu Ahmadi (1991) sikap adalah kesiapan merespon yang sifatnya positif atau negatif terhadap objek atau situasi tertentu. Sedangkan menurut Mar'at (1981) sikap didasarkan pada konsep evaluasi berkenaan dengan objek tertentu, menggugah motif untuk bertindak laku. Ini berarti bahwa sikap mengandung unsur penilaian dan reaksi afektif yang tidak sama dengan motif. Dalam pengertian ini sikap negatif memunculkan kecenderungan untuk menjauhi, membenci, menghindari ataupun tidak menyukai keberadaan suatu objek. Sedangkan sikap positif memunculkan kecenderungan untuk menyenangkan, mendekati, menerima, atau bahkan mengharapkan kehadiran objek tertentu.

Berpijak dari uraian di atas, maka sikap masyarakat (baik berupa dukungan atau penolakan) terhadap pemberdayaan keluarga sangat tergantung (dipengaruhi) oleh informasi yang dimiliki (baik yang didapat pada masa lalu maupun masa sekarang). Berkaitan dengan

hal tersebut, Newcomb (1985) mengemukakan suatu prinsip umum, bahwa sikap terhadap suatu objek akan lebih mudah dirubah bersamaan dengan masuknya informasi yang berlawanan dengan sikap itu, apabila jumlah informasi yang disimpan mengenai objek tersebut lebih sedikit dari pada informasi yang baru masuk.



Keterangan:

1. *Persamaan persepsi: Public sector, Privat sector dan Collectif action sector merupakan tiga serangkai (threepartide) dalam menghadapi berbagai permasalahan. Ketiga unsur tersebut harus mempunyai (1) kesamaan persepsi tentang Keluarga miskin dan upaya pemberdayaannya, (2) kesadaran terhadap peran dan fungsi masing masing sektor.*
2. *Penguatan Potensi kepada masyarakat (khususnya keluargamiskin) agar lebih mampu dalam peningkatan kondisi sosial ekonomi.*
3. *Pengorganisasian masyarakat.*
4. *Kemitraan dari ketiga unsur akan menjadi suatu kekuatan besar dalam peningkatan keberdayaan keluarga*

Pemberdayaan Keluarga Miskin di sekitar industri pertambangan, merupakan penelitian tahap awal yang berupaya untuk menggali informasi yang dipergunakan dalam penyusunan konsep model. Ditinjau dari segi

kemanfaatannya, penelitian ini merupakan penelitian tindakan Menurut Nazir (1985) dalam Bohar Suharto (1995) bahwa Riset Kaji Laksana (RKL) adalah suatu penelitian yang dikembangkan secara bersama-sama antara peneliti dan pengambil keputusan (*decision maker*) tentang variabel-variabel yang dapat dimanipulasikan dan dapat dipergunakan untuk menentukan kebijaksanaan dalam pembangunan. Peneliti dan pihak pengambil keputusan bersama-sama menemukan masalah, membuat desain dan serta melaksanakan program tersebut

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan partisipatif. Masyarakat sebagai pelaku (aktor) pada setiap tahap proses pemberdayaan, sedangkan peneliti lebih bersifat memfasilitasi dan mengamati fenomena yang terjadi dalam proses pemberdayaan. Clark dan Gilbert (2001) dalam Adiyaksa (2009) Kelebihan pendekatan ini adalah peneliti bisa mendapatkan perspektif yang lebih alamiah/natural dari suatu kehidupan masyarakat. Di sisi lain Britha Mikkelsen (1999) Pendekatan partisipasi pada upaya pengembangan berlandaskan pada beberapa asumsi:

1. bahwa pengetahuan masyarakat sama pentingnya seperti pengetahuan para pakar
2. bahwa dukungan masyarakat terhadap suatu proyek pembangunan akan meningkat apabila mereka secara aktif ikut ambil bagian dalam proses pengambilan keputusannya.
3. Data dan informasi untuk kebutuhan analisis dihimpun dari beberapa sumber informasi yang ada kompetensinya dengan penelitian ini seperti tertuang dalam tabel 1 berikut:

Penggalan data informasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (1) Wawancara dengan keluarga miskin menggunakan *interview guide*; (2) *Focused Group Discussion* (Diskusi

Tabel 1: Sumber data dan informasi

Sumber data	Jumlah	Keterangan
Keluarga Miskin	30	Data Primer
Tokoh masyarakat	2	Data Primer
Lembaga Swadaya Masyarakat	1	Data Primer
Aparat Pemerintah Lokal	1	Data Primer
Instansi sektor	3	Data Primer & Sekunder
Pengembang Kawasan	1	Data Primer & Sekunder
Industri	3	Data Primer & Sekunder

Kelompok Terfokus) dengan berbagai unsur terkait (aparatus pemerintah lokal, dinas terkait, tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di daerah setempat); (3) Studi Dokumentasi, dengan mempelajari buku dan atau literatur, hasil-hasil penelitian, catatan tertulis dan sebagainya yang relevan dengan tujuan penelitian; dan (4) Observasi Unit analisis dalam penelitian ini terdiri dari keluarga miskin, Pengelola Industri, instansi sektor dan lembaga sosial yang mempunyai kompetensi dengan pemberdayaan penanganan masalah Kemiskinan. Dalam penelitian yang digunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabalong merupakan salah satu kabupaten dari 13 Daerah Tingkat II yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tabalong yang beribukota Tanjung terletak paling utara dari Provinsi Kalimantan selatan yang berjarak sekitar 245km (Banjarmasin). Kabupaten Tabalong terbagi dalam 12 kecamatan, yang terdiri dari 122 desa dan 9 kelurahan. Dalam kerangka pengembangan wilayah, Tabalong terbagi atas tiga Wilayah Pengembangan Pembangunan (WPP), Bagian utara meliputi kecamatan Haruai, Bintang Ara, Upau, Muara Uya dan Jaro. Bagian tengah meliputi kecamatan Tanta, Tanjung dan Murung Puduk dan bagian selatan meliputi kecamatan

Banua Lawas Pugaan, Kelua dan Muara Harus. Pembagian regional tersebut pada dasarnya mengacu pada karakteristik wilayah yakni bagian utara adalah areal perkebunan, tengah adalah perkotaan dan selatan adalah pertanian (sawah tadah hujan).

Berdasar dari hasil Diskusi antara peneliti dengan beberapa pejabat Dinas Sosial, konsultasi dengan Wakil Bupati Tabalong dan diskusi dengan CSR Adaro Indonesia, maka sasaran dari penelitian kasus ini ditetapkan di Kecamatan Muara Harus khususnya desa Manduin. Penetapan desa Manduin sebagai lokasi penelitian kasus tersebut antara lain Manduin terletak di lintasan transportasi (houting road) pengangkutan batu bara dari lokasi penambangan ke pelabuhan dan dikategorikan sebagai desa Ring I.

Karakteristik Desa Sasaran Pemberdayaan

Manduin merupakan salah satu desa dari 7 desa yang berada di Kecamatan Muara Harus³. Secara administratif, sebelah Utara desa Manduin berbatasan dengan Desa Bingkai Sari Kecamatan Tanta, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tantaraning, sebelah Timur dengan Desa Harus dan Sebelah Barat dengan Desa Mantuil (KSK, Muara Harus, 2010). Luas wilayah desa Manduin adalah 8,51 km atau sebesar 13% dari luas Kecamatan.

³ Desa yang berada di Kecamatan Muara Harus adalah Mandang, Padangin, Harus, Tantaraning, Manduin, Mantuil, dan Murung Karang (KSK Muara Harus 2010).

Wilayah desa Manduin terbelah menjadi dua oleh jalan yang secara khusus diperuntukkan sebagai transportasi pengangkutan batu bara (Hauling road), dari lokasi penambangan - pelabuhan tepatnya di kilometer 52. Ditinjau dari jarak (orbitasi). Manduin merupakan desa yang relatif dekat dengan ibukota kabupaten Tabalong yakni sekitar 10 Km dan relatif masih mudah dijangkau baik dengan kendaraan roda 4 maupun roda dua. Jalan antar desa di lingkungan kecamatan umumnya sudah diperkeras dan beraspal. Fasilitas transportasi dari desa ke ibukota Kabupaten maupun daerah belum difasilitasi dengan angkutan umum. Fasilitas umum yang dipergunakan untuk interaksi sosial ke luar daerah masyarakat menggunakan jasa Ojek. Biaya naik ojek dari desa ke Ibukota Kabupaten Tabalong sekitar Rp.10.000,-.

Ditinjau dari struktur organisasi pemerintahan desa, Manduin merupakan desa yang masih sederhana. Desa Manduin dipimpin oleh seorang Kepala Desa (menurut bahasa setempat Pembekal). Secara administratif, wilayah Manduin hanya terbagi dalam empat Rukun Tetangga (RT) yang secara langsung berada di bawah Kepala Desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa desa tersebut merupakan desa yang masih relatif sederhana.

Dalam kerangka peningkatan kesehatan masyarakat, desa Manduin telah difasilitasi dengan Polindes dan Bidan praktek. Puskesmas Pembantu yang terdekat terletak di desa Mantuil dengan jarak sekitar 3 km dari desa. Puskesmas di kecamatan Muara Harus yang berjarak sekitar 5km dari desa Manduin. Di Puskesmas Kecamatan sudah difasilitasi dengan sistem rawat inap.

Di Desa Manduin telah terbentuk beberapa kelembagaan desa yang secara rutin telah mempunyai aktivitas bersana secara rutin. Lembaga dimaksud antara lain: PKK, Kelompok

Tani, Kelompok Tani Wanita. Majelis Taklim. Berdasar dari kondisi fasilitas tersebut di atas, maka dapat dikemukakan, bahwa masyarakat desa Manduin memiliki akses sosial dan ekonomi yang cukup baik. Meskipun fasilitas tersebut bukan di wilayah desa, namun fasilitas tersebut keberadaannya masih di dalam wilayah Kecamatan Muara Harus.

Karakteristik Masyarakat Desa

Manduin merupakan desa yang relatif belum padat penduduknya yakni sebanyak 690 jiwa yang terdiri dari 335 perempuan 355 dan tergabung dalam 181 KK. Rata-rata setiap RT terdapat 45 KK dan atau 172 jiwa. Sebagian besar penduduk adalah warga asli Manduin, dan sebagian berasal dari Jawa dan Kalimantan Tengah. Hasil observasi dan identifikasi tentang karakteristik masyarakat di desa Manduin, ada beberapa aspek yang menarik yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

Ditinjau dari segi partisipasi pendidikan, tingkat pendidikan yang dicapai sebagian besar masyarakat adalah menengah ke bawah. Jumlah penduduk yang belum yang belum menamatkan tingkat yang paling dasar cukup banyak, bahkan ada penduduk belum melek huruf. Berdasar data yang tercatat di Kantor Desa Manduin, yang paling banyak adalah: tamat SD (320 orang); tamat SLTP sebanyak 93 orang; tamat SLTA 48 orang, dan perguruan tinggi 1 orang. Menurut Camat Muara Harus, dari aspek pendidikan masyarakat desa Manduin dikategorikan sebagai desa tertinggal. Kondisi ini tentunya ada keterkaitan dengan fasilitas pendidikan yang tersedia baik di desa maupun di kecamatan.

Masyarakat Manduin merupakan masyarakat yang religius (100 persen penduduk beragama Islam). Masyarakat taat ibadah dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam. Fasilitas ibadah yang telah dibangun adalah 1

Masjid dan 3 Langgar dengan dana swadaya masyarakat. Nilai agama telah dijadikan spirit bagi anggota masyarakat untuk melakukan setiap aktivitas sosial. Gotong Royong dan Tolong Menolong senantiasa masih terjaga. Eksistensi nilai Gotong royong masyarakat desa dimaksud tercermin dari kegiatan bersih desa, acara hajatan (perkawinan).

Sebagian besar masyarakat desa Manduin bekerja sebagai petani. Mereka yang bekerja sebagai buruh penderes (penyadap) karet rata-rata hanya bekerja rata-rata dua jam setiap hari. Wilayah ini merupakan konsentrasi untuk pengembangan pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian (padi) dari wilayah ini diharapkan mempunyai fungsi support untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Tabalong. Namun kondisi persawahan di Manduin belum didukung dengan teknologi irigasi. Dalam pengelolaan lahan pertanian, selama musim tanam tergantung dari curah hujan (sawah tadah hujan). Kondisi persawahan hanya bisa ditanami sekali dalam satu tahun itupun kalau hujannya. Meskipun sebagian besar masyarakat adalah petani, namun untuk memenuhi kebutuhan sayur banyak penduduk yang bergantung pada pedagang sayuran keliling. Sedangkan Perkebunan yang utama adalah perkebunan Kelapa dan Karet. Sebagai pekerjaan sampingan, masyarakat juga melakukan budidaya ternak (ayam dan itik) namun pemeliharaannya masih sangat sederhana.

Karakteristik Keluarga Miskin

Manduin merupakan desa yang berpotensi besar untuk tanaman industri seperti karet, bahkan karet telah dijadikan sebagai produk unggulan yang mampu menopang perekonomian Kabupaten. Persoalannya adalah mengapa

kemiskinan di desa Manduin persentasenya cukup tinggi. Dari 181 KK yang ada di desa yang dikategorikan sebagai keluarga miskin mencapai 47 KK (25,96%). Menurut Kepala desa:” data tentang jumlah keluarga miskin didesa diambil dari jumlah keluarga penerima beras miskin (Raskin)”⁴.

Karakteristik keluarga miskin di desa ini adalah: (1). Dari segi asal tempat tinggal pada umumnya warga asli Desa Manduin, hanya beberapa orang saja yang berasal Jawa dan dari desa lain yang masih dalam lingkungan wilayah Kabupaten Tabalong; (2). Berdasarkan jumlah anggota keluarga yang tinggal serumah, berkisar antara 3 orang sampai dengan 7 orang. Pada umumnya dalam satu rumah dihuni oleh keluarga batih, namun ada beberapa unit keluarga yang tinggal bersama dengan anaknya yang sudah menikah, maupun dengan adik atau ibunya yang sudah tua. Jumlah anak yang dimiliki oleh unit keluarga batih paling sedikit 2 orang dan paling banyak 5 orang. Sebagian besar dari mereka mempunyai anak hanya 2 orang, sebagian kecil hanya memiliki 3 orang anak. Sementara itu, ada satu orang yang anaknya berjumlah 5 orang; (3). Partisipasi pendidikan anggota keluarga umumnya adalah rendah. Umumnya mereka berpendidikan SD/SR, tidak tamat, bahkan banyak yang tidak dapat membaca dan tulis. Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Umumnya mereka adalah buruh tani dan buruh penyadap karet dengan sistem pengupahan bagi hasil.

Permasalahan yang dihadapi keluarga dalam kehidupan sehari-hari intinya bersumber pada kondisi ekonomi, yakni penghasilan yang minim dan tidak tetap. Kondisi ini dapat dipahami, karena sebagian besar penghasilan

⁴ Tolok ukur yang dipergunakan untuk menentukan jumlah keluarga miskin adalah berdasar dari data penerima beras miskin yang ada di desa. Penerima beras miskin merupakan hasil seleksi pada tahun 2010.

warga perbulan relatif kecil. Cukup sulit untuk menghitung penghasilan warga masyarakat secara bulanan (rata-rata per bulan), karena penghasilan yang diperoleh tidak menentu. Dari hasil wawancara, penghasilan tersebut berkisar antara Rp 240.000,- sampai dengan Rp 2.250.000,- per bulan. Itupun hanya ada seorang saja yang berpenghasilan Rp 1.100.000,- sebagai pedagang, dan seorang lainnya Rp 2.250.000,- sebagai penjahit. Paling banyak adalah keluarga yang berpenghasilan rata-rata Rp 990.000,- Mereka adalah buruh tani dan petani kecil.

Khususnya untuk pemenuhan kebutuhan makan sudah dapat dikategorikan cukup, namun untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan anak masih sangat terbatas terlebih lagi jika anak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kesulitan untuk mengakses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tersebut diungkapkan oleh Tokoh masyarakat peserta FGD: *"apabila anak-anak mereka ingin bersekolah banyak hal yang diperlukan oleh anak; seperti pakaian seragam, tas sekolah, alat tulis, dan alat transport. Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiah harus mempunyai sepeda, karena jarak sekolah dari rumah jauh"*. Untuk mengatasi permasalahan seperti dikemukakan di atas, yang paling banyak adalah mengatakan mencari pekerjaan tambahan seperti mencari ikan di sungai, dan menjadi buruh menoreh getah karet. Lainnya mengatakan pinjam kepada saudara, ke Bank, menabung di sekolah, namun ada juga yang mengatakan belum ada cara untuk mengatasinya.

Karakteristik industri pertambangan

Dalam kerangka Penambangan Batubara di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan di pegang oleh PT Adaro. Perusahaan ini dipercaya untuk mengelola lokasi pertambangan di dua

wilayah yakni di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan. PT. Adaro Indonesia adalah anak perusahaan PT Adaro Energy. Perusahaan ini merupakan salah satu kontraktor Pemerintah. Kantor Pusat PT adaro: Menara Karya 22nd-23nd floor Jl H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2 Jakarta 12950 Kantor Operasional di Wara KM 73, Hauling Road, PO BOX 110 Tanjung 71500 Kalimantan Selatan. (*laporan Keberlanjutan PT Adaro Indonesia tahun 2009*).

Adaro Indonesia ditetapkan sebagai perusahaan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS) di sektor energi dan sumber daya mineral (Keputusan Menteri ESDM No.1762K/07/MEM/2007 tentang pengamanan Obyek Vital Nasional di sektor energi dan sumber daya Mineral. PT Adaro adalah pemegang Kontrak No.J2/J.i.DU/52/82 tertanggal 16 Nopember 1982, untuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama yang melakukan kegiatan eksplorasi dan penambangan di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, serta pemasaran hasil produksinya. Lokasi Penambangan Adaro Indonesia terletak di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong. Lokasi peremukuan batubara (Crushing plant) dan pelabuhan muat berada di desa Kelanios, Kabupaten Barito Selatan provinsi Kalimantan Tengah. Tambang Adaro terdiri dari 3 lokasi penambangan yaitu (1) Wara (2) Paringin dan (3) Tutupan

Berkaitan dengan tanggung jawab sosial dalam memperbaiki lingkungan, Penelitian ini tidak membahas tentang masalah teknik yang berkaitan dengan lingkungan fisik yakni bagaimana mengelola, mengendalikan dan memperbaiki lingkungan fisik. Penelitian ini lebih menekankan pada lingkungan sosial khususnya yang berkaitan dengan

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat⁵. Secara umum, konsentrasi tanggung jawab sosial perusahaan meliputi 5 bidang yakni: (1) Bidang ekonomi; (2) Bidang Kesehatan;

(3); Bidang Pendidikan; (4) Bidang Sosial Budaya; dan (5) Bidang lingkungan. CSR Adaro Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 1994. Pelaksanaan CSR Adaro dapat dilihat pada matrik berikut:

Pelaksanaan CSR EC8			
Pelaksana	Sifat	Jenis	Contoh
Perusahaan	Bantuan-bantuan Charity sebagai community services dan Community relation	Hibah	Bea siswa Bibit Bantuan
Masyarakat	Proyek sederhana yang mampu dilaksanakan oleh Masyarakat	Pemberdayan Hibah	Pembangunan titian Jalan desa Pembersihan sungai
Lembaga Bentukan Adaro Indonesia	Proyek jangka panjang yang berkesinambungan	Pemberdayaan Keberlanjutan Kemandirian	LKM Pengembangan UMKM Mutu sekolah
Pihak ketiga/ Kontraktor	Proyek besar yang memerlukan keahlian khusus	Kontrak Kerja	Gedung GOR Rumah Sakit

Laporan Keberlanjutan PT ADARO Indonesia tahun 2009

Beberapa bentuk kepedulian PT Adaro Indonesia yang disalurkan melalui CSR Adaro ke Desa Manduin antara lain: (1) Pemberian sembako ke masyarakat kurang mampu; (2) Pemberian Traktor (mesin pembajak sawah); (3) Pemberian alat perontok padi; (4) Pemberian bibit karet kepada masyarakat; (5) Pembangunan sekolah SD; (6) Pemberian peralatan sekolah bagi anak SD; (7) Pelatihan menjahit kepada generasi muda yang dilengkapi dengan pemberian stumulan berupa beberapa mesin jahit (enam mesin jahit dan satu mesin obras); (8) Program Kesehatan Ibu, bayi baru lahir dan Anak (KIBBLA); (9) Operasi Karatak; (10) Pelayanan kesehatan untuk Balita dan Lansia; (11) Modal usaha ternak ikan, ternak bebek, ternak ayam.

Prioritas yang dijadikan sasaran Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat CSR Adaro and Partner adalah:

1. Desa-desa/masyarakat yang bersentuhan atau akan bersentuhan dengan operasional dan/atau dampak operasional (selanjutnya disebut sebagai wilayah ring 1)
2. Desa-desa/masyarakat yang rentan dengan berbagai kebutuhan berkaitan dengan operasional Adaro (selanjutnya disebut sebagai wilayah ring 2)
3. Desa-desa/masyarakat yang berada berada dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan dan memiliki kepentingan (selanjutnya disebut sebagai wilayah ring 3)

Berdasar dari kriteria tersebut, desa Ring 1 berjumlah 61 desa yang secara administratif bereada di dua propinsi yakni: (1) Propinsi Kalimantan Selatan: a. Kabupaten Tabalong; b. Kabupaten Balangan; c. Kabupaten Hulu Sungai Utara; d. Kabupaten Barito Kuala; (2) Propinsi Kalimantan Tengah: a. Kabupaten Barito Timur; b. Kabupaten Barito Selatan.

⁵ Secara instrumental Sonny Keraf mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial dunia usaha terhadap relasi sekunder adalah bertanggung jawab atas operasi dan dampak bisnis terhadap masyarakat pada umumnya, atas masalah-masalah sosial seperti: lapangan pekerjaan, pendidikan, prasarana sosial, pajak dan sebagainya.

Dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (program Bina desa) yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat disesuaikan prioritas berdasar pembagian RING. Besarnya dana tersebut adalah: (1) Alokasi dana untuk desa ring I sebesar Rp. 75.000.000; (2) Alokasi dana untuk desa ring II sebesar Rp. 50.000.000; (3) Alokasi dana untuk desa ring III sebesar Rp. 25.000.000,-

Praktik Pemberdayaan Keluarga

Dalam praktik pemberdayaan masyarakat di satu wilayah (sekitar industri pertambangan), Pemerintah sebagai regulator telah menentukan keputusan tentang pentingnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kewajiban Dunia usaha dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kegiatan usahanya. Kontribusi Dunia Usaha dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut adalah alokasi dana dari bagian keuntungan untuk penyelenggaraan tanggung-jawab sosial (CSR). Beberapa tahap yang dilaksanakan dalam praktek pemberdayaan masyarakat (khususnya keluarga miskin), adalah sebagai berikut:

Prakondisi

Prakondisi merupakan salah satu langkah atau tahapan, dalam konteks ini adalah membangun komitmen ketiga unsur pokok pelaksanaan pemberdayaan. Menyatunya ketiga sektor (*threepartide*) merupakan kekuatan besar dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat. Ketiga unsur tersebut harus mempunyai kesamaan persepsi tentang pemberdayaan masyarakat. Persamaan persepsi merupakan langkah awal untuk mengantisipasi timbulnya kekaburan peranan dan konflik kepentingan dikalangan masyarakat, keluarga, tokoh masyarakat dan pemerintah desa dan dunia usaha (*Consensus*

Building). Kegiatan yang dilaksanakan adalah diskusi dengan (1) Pemerintah kabupaten (Wakil Bupati) dan Camat dan (2) Dunia Usaha (CSR Adaro Indonesia). Beberapa aspek yang menarik dari diskusi (secara terpisah) dengan ke dua unsur dimaksud adalah:

Pemerintah Kabupaten dan Pemegang Ijin Usaha Penambangan (IUP) yakni Adaro telah mempunyai komitmen bersama untuk merealisasikan aksi penambangan dan pemberdayaan masyarakat.

Program yang diselenggarakan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat manfaat yang lebih luas.

Kegiatan yang dilaksanakan di Tingkat desa adalah kegiatan yang bersifat partisipatif yang disusun berdasar musyawarah desa.

Kegiatan pengembangan usaha masyarakat (usaha ekonomi produktif) disesuaikan dengan potensi lokal yakni di sektor pertanian dan perkebunan

Dana pemberdayaan (dana Program Bina Desa) dari CSR Adaro adalah untuk menunjang kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tidak dapat dipergunakan sebagai dana pembangunan fisik.

Dalam kerangka pemberian kewenangan (otonomi dan kebebasan untuk berpartisipasi) kepada masyarakat, langkah awal yang harus dilakukan adalah sosialisasi program dari CSR yang sudah disepakati oleh kedua lembaga (pemerintah dan dunia usaha). Sosialisasi program CSR⁶ dan bagaimana bentuk realisasinya di tingkat desa dilakukan oleh pejabat CSR Adaro dan Peneliti Indonesia yang dilaksanakan di rumah Kepala desa. Peserta

⁶ Sosialisasi dihadiri oleh pejabat dari instansi sosial dan peneliti.

yang hadir dalam acara sosialisasi ini adalah pemerintah dan aparat desa, tokoh masyarakat dan warga masyarakat (calon penerima program).

Kegiatan dimaksud merupakan salah satu upaya untuk mempertemukan masyarakat dengan dunia usaha dan membangun komitmen (kesediaan berperan serta dan bertanggung jawab) terhadap keberhasilan pemberdayaan/ dana yang akan diserahkan. Tujuannya adalah (1); untuk mewujudkan suasana lingkungan sosial yang kondusif untuk peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat (2) warga yang menjadi sasaran pemberdayaan berkemauan dan berkemampuan untuk diajak berperan serta untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya melalui proses pengorganisasian masyarakat. (3) peningkatan motivasi masyarakat, bahwa mereka tidak bekerja sendiri. Mereka merupakan bagian dari desa/ kelurahan, sehingga apapun yang mereka lakukan adalah kegiatan seluruh warga (4) Sadar ataupun tidak keberhasilan program yang telah disusun kelompok kerja sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat luas.

Hasil sosialisasi program CSR di desa Manduin diperoleh kesepakatan adanya (1) Persetujuan masyarakat, untuk turut berperan dalam upaya pemberdayaan keluarga miskin (2) komitmen bersama antara peneliti, masyarakat, CSR Adaro Indonesia dan aparat Desa Manduin. Komitmen antara lain kesediaan berperan serta dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan pemberdayaan/ dana yang akan diserahkan.

Kesepakatan antara Pemerintah dan Dunia Usaha dimaksud merupakan salah satu pengejawantahan dari pemberian otonomi (wewenang) dan kebebasan masyarakat untuk menentukan pilihan kegiatannya. Dalam konteks ini masyarakat berperan

sebagai (1) perencana kegiatan, artinya mereka adalah orang yang paling mengetahui situasi dan kondisi diri untuk berkembang dan potensi yang ada lingkungannya (2) sebagai pelaksana kegiatan, yakni mereka adalah yang bertanggungjawab dan menjamin bahwa kegiatan yang direncanakan pasti akan dilaksanakan dan (3) sebagai pemanfaat dari hasil kegiatannya, artinya produk yang telah dihasilkan harus mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat khususnya untuk peningkatan kondisi sosial ekonomi keluarga.

Dinamika Sosial Masyarakat Dalam Proses Pemberdayaan

Kegiatan ini dilakukan oleh penduduk desa Manduin melalui musyawarah dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui dan menentukan masalah yang ada di wilayahnya. Selain itu juga untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Terungkapnya permasalahan dan potensi dimaksud akan dijadikan sebagai dasar penentuan kegiatan prioritas desa. Berdasar dari diskusi kelompok terfokus (FGD) antara kepala desa dan aparat serta ada beberapa aspek yang menarik yakni

Pertama permasalahan kesejahteraan sosial di desa: (1) Pekerjaan sebagian besar keluarga miskin bekerja sebagai buruh tani dengan kondisi tanah tadah hujan dan buruh penyadap karet. Jumlah tanggungan keluarga cukup banyak dan kebutuhan pokok yang tidak dapat ditunda. Penghasilan keluarga habis dan kurang mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Kondisi ini telah berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. Terlebih lagi jarak lokasi sekolah lanjutan dengan desa yang cukup jauh dan membutuhkan biaya yang besar; (2) Kesulitan Penduduk untuk memperoleh pekerjaan karena pendidikan yang rendah sehingga pengangguran tenaga kerja produktif cukup besar; (3) Perkawinan usia dini di lingkungan

masyarakat cukup tinggi; (4) Sebagian besar pekerjaan penduduk desa Manduin adalah petani tetapi untuk memasak sayur harus menunggu pedagang sayur yang lewat; (5) Desa manduin merupakan desa yang terletak di berbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang cukup besar pengaruhnya terhadap meningkatnya permasalahan sosial; (6) Permasalahan sosial yang ada seperti perjudian

Kedua potensi sosial Kesejahteraan sosial desa: (1) Jenis pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah buruh tani dan penyadap karet; (2) Lahan persawahan tadah hujan dan panen hanya satu tahun sekali; (3) Tanaman perkebunan di lahan pekarangan masyarakat kurang produktif; (4) Pangsa pasar bibit karet cukup besar: meliputi seluruh wilayah di Kalimantan; (5) Lokasi desa di pinggir sungai yang potensi untuk penambangan pasir; (6) Tanah hibah untuk masjid yang dapat dimanfaatkan untuk usaha; (7) Penyediaan air bersih (sumur) kurang ada pangsa gorong-gorong; (8) Pengalaman masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan dari adaro; (9) Nilai Gotong royong masyarakat masih dijunjung tinggi; (10) Perkumpulan ibu rumah tangga yang cukup; (11) Pengembangan industri perkebunan karet sebagai komoditas ekspor; (12) Pengembangan Biofuel sebagai pengganti bahan bakar dari hasil tambang; (13) Keahlian ibu rumah tangga membuat opak (kerupuk dari singkong) untuk kebutuhan keluarga.

Ketiga kegiatan yang dapat dilakukan untuk peningkatan ekonomi masyarakat antara lain: (1) Usaha Pembibitan Karet unggul; (2) Usaha Pembuatan pupuk organik; (3) Usaha Pembuatan gorong-gorong; (4) Budi daya Ikan dengan sistem keramba; (5) Budi daya ikan dengan kolam terpal; (6) Budi daya belut dengan drum; (7) Usaha Ternak itik dan ayam;

(8) Optimalisasi lahan pekarangan penduduk dengan budi daya tanaman pangan (sayuran); (9) Usaha Menjahit; (10) Home industri opak.

Seleksi Penentuan Prioritas Kegiatan

Prinsip dasar yang dipergunakan untuk menentukan jenis kegiatan yang dijadikan prioritas benar-nenar berasal dari masyarakat. Dalam kerangka penentuan jenis kegiatan yang dilakukan di desa ada beberapa aspek yang dijadikan pertimbangan (analisis) untuk menentukan prioritas kegiatan. Aspek dimaksud antara lain: (1) Pengalaman usaha; (2) Pangsa Pasar; (3) Penguasaan Teknik; (4) Bahan Baku; (5) Resiko usaha; (6) Lokasi/lahan untuk usaha; (7) Modal yang dibutuhkan.

Dalam proses penentuan kegiatan tersebut didampingi oleh Petugas lapangan⁷. Berdasar hasil musyawarah desa ditentukan beberapa kesepakatan sebagai berikut: (1) Kegiatan yang akan dilakukan meliputi (1) Usaha Pembibitan Karet unggul; (2) Usaha Pembuatan pupuk organik; (3) Usaha Pembuatan gorong-gorong; (4) Budi daya Ikan dengan sistem keramba; (2) pembentukan kelompok kerja yakni dibentuk berdasarkan kewilayahan (wilayah RT) dan kesamaan minat (jenis kegiatan). Ketentuan dimaksud sebenarnya untuk memastikan adanya intensitas interaksi sosial diantara anggota kelompok dan memudahkan koordinasi kerja kelompok. Masing-masing kelompok bertanggung jawab atas keberhasilan jenis usaha yang diminati. Masing-masing kelompok (tiap RT) terdiri dari 10 orang; (3) Ketentuan alokasi dana kegiatan masyarakat desa tersebut di stimuli dari CSR Adaro Sebesar RP.75.000.000,-

Tim penanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di

⁷ Pendamping lapangan dimaksud adalah Faturahman sebagai Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong. Faturahman adalah PPL yang ditugaskan di desa Manduin, Kec Muara Hartus Kab, Tabalong.

Desa Manduin ini terdiri dari 9 orang. Untuk memperoleh legitimasi, tanggal 11 Juli 2011 Pemerintah Desa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Manduin Nomor 05 tahun 2011 tentang Tim pemberdayaan masyarakat desa Manduin. Selanjutnya, tim yang telah terbentuk dan memperoleh pengukuhan Kepala Camat pada tanggal 13 Juli 2011. Acara Pengukuhan ini disaksikan oleh Peneliti, Pimpinan CSR Adaro, pejabat kecamatan, tokoh masyarakat dan seluruh anggota kelompok yang telah terbentuk. Setelah dikukuhkan Tim Pemberdayaan harus membuka rekening bank untuk pencairan dana dari Adaro. Pencairan dana tersebut harus disertai dengan proposal yang telah disusun oleh masing-masing kelompok.

Implementasi program dari kelompok kerja

Program prioritas desa telah tersusun berikut kelompok kerja yang akan melaksanakan kegiatan. Tim pelaksana pun telah dikukuhkan oleh camat. Pembagian (alokasi) dana untuk kegiatan masyarakat sudah dipetakan peruntukannya. Masing-masing kelompok kerja tinggal menyusun proposal kegiatan kelompok yang ditujukan ke CSR Adaro untuk memperoleh pendanaannya. Namun dalam realisasi kegiatannya tidak sederhana.

Ditengah perjalanan program yang telah disusun berdasar musyawarah desa mengalami perubahan. Dana Bina Desa dari CSR Adaro yang ditujukan untuk pengembangan usaha masyarakat akan dialihkan untuk pembangunan fisik balai desa. Pengalihan dana tersebut dilakukan beberapa hari setelah pengukuhan Pemberdayaan. Kondisi ini terjadi karena, beberapa hari setelah pengukuhan Tim Pemberdayaan terjadi polemik diantara warga masyarakat yang intinya memandang bahwa elit desa tidak adil dalam penentuan kelompok kerja.

Dalam kerangka menghindari terjadinya

hubungan yang kurang harmonis diantara masyarakat desa, diselenggarakan pertemuan antara peneliti, dunia usaha dengan masyarakat desa (termasuk tokoh masyarakat dan aparat desa). Dalam pertemuan tersebut disampaikan beberapa ketentuan yang harus ditaati dalam penggunaan dana bina desa. Ketentuan dimaksud adalah: (1) Program CSR di lapangan merupakan hasil diskusi final di tingkat Kabupaten dan telah dijadikan keputusan Bupati Kabupaten Tabalong; (2) Dana Bina desa hanya diperuntukkan untuk Pengembangan kegiatan usaha masyarakat, tidak untuk pembangunan fisik; (3) Kegiatan usaha masyarakat yang diprioritaskan adalah usaha di bidang pertanian; (4) Khusus untuk usaha ternak ikan dengan sistem keramba di sungai tidak diperkenankan.

Setelah mendengar penjelasan dari Adaro, maka musyawarah desa harus menentukan produk unggulan desa yang perlu mendapat perhatian khusus. Dari musyawarah tersebut, berhasil memutuskan kegiatan usaha unggulan yakni pembibitan Karet, Gorong-gorong dan budidaya pangan (sayuran) dengan sistem polibag.

Bibit Karet merupakan salah satu produk unggulan yang diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat desa. Pembibitan karet ini memanfaatkan lahan (tanah hibah masjid seluar satu hektar). Jumlah anggota tidak dibatasi karena kegiatan ini sekaligus sebagai pembinaan bagi pemuda. Pemilihan kegiatan ini didasari pertimbangan: ada lahan, tenaga PPL yang siap mendampingi secara teknik dan mempunyai pasar. Usaha Pembibitan Karet Unggul dapat didiversifikasi dengan Usaha Pembuatan Pupuk Organik. Bahan baku untuk usaha baik pembibitan karet unggul maupun pupuk organik cukup tersedia.

Masyarakat desa umumnya telah mempunyai pengalaman dalam bidang perkebunan karet,

baik sebagai buruh penderes (penyadap) maupun penanam. Sebagian masyarakat memanfaatkan lahan pekarangannya dengan pohon karet. Mengingat bahwa perkebunan karet memerlukan lahan yang cukup luas, sementara itu lahan untuk perkebunan di desa Manduin sangat terbatas, maka kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mungkin dapat dilakukan adalah Usaha Pembibitan karet unggul. Menurut Pimpinan CSR Adaro, bahwa hingga saat ini kita belum mampu untuk memenuhi kebutuhan bibit karet unggul di Kalimantan Selatan yang luasnya ribuan hektar, apalagi kebutuhan di luar Kalimantan Selatan.

Ditinjau dari segi teknologi, pembibitan karet unggul dengan teknik okulasi dapat memberikan keuntungan yang relatif cepat. Permasalahannya adalah: apakah masyarakat telah mengetahui dan dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Permasalahan tersebut dapat segera diatasi sepanjang ada kemauan dari masyarakat. Artinya, secara teknik ada orang yang telah ditunjuk sebagai Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong. Penyuluh tersebut statusnya sebagai tenaga pendamping dengan status di Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai Fungsional. PPL tersebut telah mempunyai pengalaman cukup banyak khususnya dalam pembinaan dan pengembangan kelompok usaha pembibitan di beberapa daerah. Jika seseorang yang telah dilatih dan terbiasa dalam pelaksanaan teknik tersebut, maka kegagalannya relatif kecil. Menurut Faturahman (PPL), resiko kegagalan dalam okulasi kurang dari 10 persen.

Prioritas anggota kelompok adalah warga

yang dikategorikan sebagai keluarga miskin, dan beberapa warga non miskin untuk pemandu. Dalam struktur pengelolaan kegiatan, setiap kelompok mempunyai Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seksi Sarana Produksi. Selanjutnya untuk menjaga komitmen setiap anggota, masing masing kelompok menyusun aturanmain yang pada intinya adalah menentukan hak dan kewajiban anggota. Aturan kelompok dirumuskan secara partisipatif. Aturan yang dirumuskan antara lain: 1). Setiap anggota wajib ikut gotong royong dalam penyiapan fasilitas usaha (misalnya pembuatan kandang, penyiapan lahan pembibitan). 2). Jadwal pemeliharaan, secara bergiliran; 3). Membuat aturan tata tertib kelompok serta sanksi bagi yang melanggar ketentuan; 4). Memberlakukan penetapan iuran bulanan berupa sejumlah uang kepada anggota kelompok usaha yang akan digunakan sebagai penambahan modal. 5) sistem pembagian keuntungannya. Aturan main tersebut mereka perlukan untuk menghindari terjadinya kericuhan jika kelak dikemudian hari usaha ekonomi yang dijalankan mengalami kemajuan. Tugas paling awal yang harus diselesaikan oleh kelompok adalah setiap kelompok berkewajiban untuk menyusun proposal kegiatan usaha. Proposal dimaksud termasuk modal yang dibutuhkan, biaya operasional, dan prediksi berapa keuntungan yang dapat diperoleh.

Kebijakan Pemberdayaan Keluarga Miskin

Program pemberdayaan masyarakat di lingkungan industri pertambangan yang secara khusus menunjuk pada keluarga miskin sudah tampak jelas. Kondisi dimaksud tercermin dari beberapa produk hukum⁸ yang mengikat

⁸ Produk hukum dimaksud adalah Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan lain yang mengikat khususnya berkaitan dengan industri milik negara diikat dengan Surat Keputusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 236 tahun 2003 tentang Program Kemitraan dan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; dan Surat edaran Menteri BUMN No 233 tahun 2003 yang pada prinsipnya mewajibkan Industri dalam lingkungan BUMN di seluruh Indonesia untuk melaksanakan program Community Development.

(mandatoris) pelaku bisnis (dunia usaha), bahwa pelaku bisnis harus menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat telah dijadikan unsur penting dan turut menentukan program yang akan diselenggarakan. Secara eksplisit, ketentuan ini dapat ditemui pada pasal 108 ayat (2) Undang-Undang No 4 tahun 2009 dan pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2010. Klausul dari dua ayat tersebut menegaskan bahwa program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat harus dikonsultasikan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan Masyarakat setempat. Menurut Sudrajat (2010), pemberdayaan wilayah dan/ atau masyarakat dan daerah sekitar kegiatan usaha pertambangan khususnya, dan negara pada umumnya, merupakan bagian proses dari penataan sistem pengelolaan pertambangan yang baik dan benar yang diharapkan bermuara pada tercapainya optimalisasi pemanfaatan bahan galian. Artinya penataan ini merupakan langkah awal keberpihakan negara pada rakyat, agar hasil dari bahan galian yang ada dalam wilayah hukum Indonesia benar-benar dinikmati secara nyata. Di tingkat Kabupaten, komitmen bangsa ini (khususnya di Kabupaten Tabalong) telah dibentuk tim dalam penyelenggara CSR⁹.

Secara teknis setiap instansi sektoral mempunyai SDM untuk penjangkauan pelayanan sampai di tingkat desa. Instansi yang terkait dalam tim pengembangan dan pemberdayaan masyarakat telah mempunyai komitmen dan persamaan persepsi terhadap pelaksanaan CSR. Namun persamaan persepsi

tersebut masih berada di tingkat kebijakan dan belum sampai pada tingkat teknis di lapangan. Implementasi program dari instansi sektoral yang terkait secara teknis belum berjalan secara sinergis.

Pendekatan Pemberdayaan

Dalam praktik pemberdayaan masyarakat, pendekatan pekerjaan sosial semakin dibutuhkan. Namun dalam implementasinya Instansi sosial belum dapat ambil bagian dalam pengembangan dan pemberdayaan dimaksud. Di satu sisi, instansi sosial Kabupaten Tabalong yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dan pendekatan pekerjaan sosial belum terakomodasikan sebagai anggota dalam TIM Tim penyelenggara CSR tahun 2011. Dukungan teknis yang sudah banyak diberikan oleh instansi kesehatan (dinas kesehatan). Kondisi ini sangat memungkinkan karena instansi kesehatan sudah mempunyai kelembagaan sampai di tingkat desa. Di sisi lain instansi sosial belum memahami dan kurang berkepentingan terhadap peaturan perundangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Dalam kerangka percepatan realisasi CSR, Dinas sosial telah memiliki membangun pilar partisipan seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna. Mereka terdiri dari orang-orang yang telah memperoleh pelatihan dalam pendampingan, khususnya dalam penanganan permasalahan sosial di lingkungannya.

Kondisi Sosial Masyarakat

PT Adaro Indonesia dan Partner tahun 1994 telah membentuk *Corporate Social*

⁹ Pada tahun anggaran 2011 Pemerintah Kabupaten Tabalong dan PT Adaro dan Partner telah membentuk tim dalam penyelenggaraan CSR yang dikukuhkan dengan Keputusan Bupati Tabalong No 188.45/291/2011 Tentang Pembentukan Tim Perumus, Pelaksana dan Pengawas serta Penetapan Penggunaan Anggaran dan Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Adaro Indonesia dan Partner tertanggal 6 Juni 2011. Tim terdiri dari unsur legislatif (DPRD), Unsur eksekutif (Pemerintah Kabupaten, Instansi sektoral dan Camat). Biaya untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah dari Adaro dan Partner.

Responsibility Adaro (CSR Adaro). Pada awalnya, realisasi dari CSR bersifat caritatif yakni kegiatan pemberian bantuan dimaksudkan untuk *community services* dan *community relation*. Pemberian bantuan¹⁰ dalam kurun waktu yang cukup panjang tentunya dapat berdampak negatif pada perilaku masyarakat yakni ketergantungan masyarakat pada CSR Adaro dan masyarakat menjadi statis, tidak berkembang. Kondisi ini tercermin dari kecenderungan masyarakat yang memandang bahwa setiap orang mempunyai hak sama untuk ikut dijadikan sebagai sasaran program dari perusahaan meskipun program tersebut ditujukan secara khusus kepada masyarakat yang tidak mampu. Oleh karena itu dalam kerangka pemberdayaan, keluarga miskin harus dipandang secara holistik. Kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan harus terintegrasi dalam program pengembangan masyarakat desa.

Prospek CSR dalam Pemberdayaan Masyarakat

CSR merupakan sebuah konsep dengan ruang lingkup yang sangat luas dan tidak ada bentuk baku dari CSR. Perusahaan berhak menentukan sendiri bentuk CSR yang akan dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya, tetapi harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat dan tetap memperhatikan hal yang telah disepakati secara umum. Corporate social Responsibility sebagai khususnya perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan telah dipandang sebagai kekuatan yang besar dalam pengembangan masyarakat.

PENUTUP

Program anti kemiskinan di lingkungan

industri pertambangan (khususnya di Kabupaten Tabalong) yang secara khusus menunjuk pada keluarga miskin sudah tampak jelas. Program yang ditujukan kepada keluarga miskin memang sudah cukup banyak. Pemberdayaan keluarga miskin telah dijadikan komitmen bangsa. Kondisi ini tercermin dari terbitnya Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Implementasi komitmen bangsa ini telah terbentuk tim Perumus, Pelaksana dan Pengawas, serta Penetapan Penganggaran dan Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) PT Adaro Indonesia dan Partner tahun 2011 dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatannya.

Secara teknis setiap instansi sektoral mempunyai SDM untuk penjangkauan pelayanan sampai di tingkat desa. Instansi yang terkait dalam tim pengembangan dan pemberdayaan masyarakat telah mempunyai komitmen dan persamaan persepsi terhadap pelaksanaan CSR. Namun persamaan tersebut persepsi masih berada di tingkat kebijakan dan belum sampai pada tingkat teknis di lapangan. Implementasi program dari instansi sektoral yang terkait secara teknis belum berjalan secara sinergis. Dukungan teknis yang sudah banyak diberikan dari instansi kesehatan (dinas kesehatan). Kondisi ini sangat memungkinkan karena instansi kesehatan sudah mempunyai kelembagaan sampai di tingkat desa.

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial dan telah dijadikan isu krusial. Berbagai bentuk upaya mulai karitatif sampai dengan pelayanan

¹⁰ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas perusahaan mempunyai kewajiban satu persen dari keuntungannya untuk disampaikan kepada masyarakat.

pemberdayaan sudah banyak dilakukan. Namun dalam praktek masih banyak kesulitan. Masyarakat telah cukup lama dimanjakan dengan alam. Potensi tambang yang cukup besar dan tanah tanah yang subur.

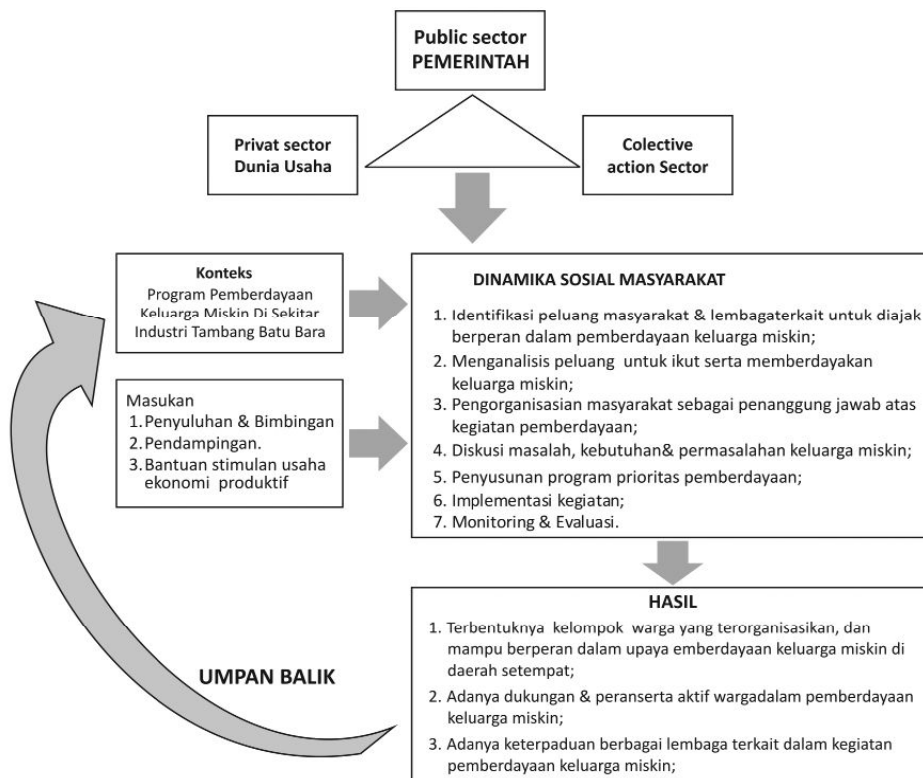
Sektor pertanian dan perkebunan merupakan lapangan kerja yang masih sangat luas. Prospek Pengembangan tanaman industri karet untuk masa yang akan datang sangat besar. Kondisi tanah yang subur merupakan potensi yang dapat dioptomalisasikan untuk pemberdayaan Keluarga.

Masyarakat desa adalah masyarakat petani subsistem dan telah mempunyai pengalaman untuk memecahkan persoalannya. Namun untuk pengembangan hasil produksi ke agro-industri masih diperlukan banyak informasi dan keterampilan untuk peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Informasi dimaksud berkaitan dengan teknologi sederhana di bidang pertanian dan perkebunan.

Idealnya dalam praktek pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan secara holistik ada tiga aktor utama yang berkepentingan yakni pemnerintah, dunia usaha dan masyarakat. Ketiga aktor pemberdayaan tersebut sudah ada persamaan persepsi tentang apa yang dimaksud dengan pemberdayaan. Persamaan persepsi tersebut merupakan modal dasar dalam pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, dalam kerangka optimaslisasi hasil penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat perlu didukung oleh unit teknis dari instansi sektoral yang terkait yang berada dalam tim pemberdayaan Kabupaten.

Optimalisasi dari pemberdayaan di tingkat desa memerlukan pendamping lapangan baik dari aspek manajemen maupun aspek teknik pengelolaan sumber daya yang ada. Untuk kebutuhan pendampingan dimaksud, idealnya difasilitasi oleh setiap instansi sektoral yang mempunyai unit teknis yang melayani sampai dengan tingkat desa.

Diagram Model



DAFTAR PUSTAKA

- Arief, I. (1995). *Kiat Pengembangan Usaha Kecil, Khususnya Sektor Informal dan Prospek Ekspor Makanan Tradisional Indonesia (Kasus di Kodya Ujung Pandang)*. Makalah dalam seminar Pengembangan Usaha Makanan Jajanan dan Sektor Informal. Kerjasama antara Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPM-IPB) dengan Kantor Menteri Negara Urusan Pangan RI, 15 November 1995.
- Badan Pusat Statistik, (1999). *Penduduk Miskin (Poor Population)*. Berita Resmi Statistik Penduduk Miskin No.04/Th.II/ July, Jakarta:CBS.
- Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial, 2002. *Penduduk Fakir Miskin Indonesia*, Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik, 2008. *Profil Kemiskinan di Indonesia 2008*. Jakarta.
- Clark, J. (1995). *NGO dan Pembangunan Demokrasi*, (Judul asli: *Democratizing Development The Role Of Voluntary Organization*: Godril Dibyo Yuono) Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Halwani, H. (1998). *Paradigma Baru: Dapatkah Ekonomi Rakyat Memainkan Peran Sentral*; Dalam Sintesis, Jurnal Bulanan Cides, Jakarta: Cides.
- Halwani, R.H., (1999). *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Makalah disajikan pada seminar yang diselenggarakan oleh The International Islamic Solidarity Forum and Center for People Participation di Bali Room Hotel Indonesia, Selasa 21 April 1999.
- Jaspers, C.H. (1991). *Introduction of Industrial Social Work*, Prentice Hall, London.
- Kartasasmita, G., (1997). *Kemiskinan*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Keraf, S., (1991). *Etika Bisnis, Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kertajaya, H., (2005). *Environmental Value sebagai Brandimage dalam Bisnis Masa Depan*, dalam Sustainable Future, Menggagas Warisan Peradaban Anak Cucu, Seputar Wacana Pemikiran Surna Tjahja Djajadiningrat, Jakarta: Indonesia Centerfor Sustainable Development (ICSD).
- Khaerudin, H., (1992). *Pembangunan Masyarakat*, Tinjauan, Sosiologi, Ekonomi, Perencanaan, Yogyakarta: Liberti.
- Mikkelsen, B., (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan* Sebuah Buku Pegangan bagi para praktisi lapangan, Penterjemah Matheos Naile, ed 1., Yogyakarta. : Yayasan Obor Indonesia.
- Mujiyadi, Gunawan, Suyanto & Basuki, U., (2002). *Pengaruh Tanggung Jawab Industri Terhadap Sikap Masyarakat Atas Keberadaan Industri*, Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Mujiyadi. B. dan Gunawan. (2000). *Pemberdayaan Masyarakat miskin (Suatu Kajian terhadap Masyarakat di Sekitar Kawasan Industri)* dalam *Informasi* Vol .5 No. 1 Januari 2000. Jakarta: Balitbang Depsos RI.

- Nangoi. R., (1993). *Transmigrasi Industri, Dimensi Baru Berpotensi*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa,
- Nasikun, (1995). *Kemiskinan di Indonesia Menurun, dalam Perangkap Kemiskinan, Problem, dan Strategi Pengentasannya*, (Bagong Suyanto, ed), Airlangga University Press
- Pranarka A.M.W dan Moeljarto V. (1995). *Pemberdayaan (Empowerment) dalam Prijono S. Onny dan Pranarka A.M.W* (penyunting), Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan implementasinya. Jakarta: Centre For Strategic And International Studies
- Poerbo H. (1999). Gelar Nalar Prof. Hasan Poerbo: *Lingkungan Binaan untuk Rakyat*, Bandung: Akatiga
- Poerwadarminata, WJS. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka
- Rachbini, D.J., Hamid, A. (1994). *Ekonomi Inormal Perkotaan*. Jakarta: LP3ES. Indonesia.
- Rustiani, F. (1996). *Masihkah Ekonomi Rakyat Boleh Berharap* dalam: Frida Rustiani ed. 1996, Dialog Nasional dan Loka Karya Pengembangan Ekonomi Rakyat Dalam Era Globalisasi: Masalah, Peluang, dan Strategi Praktis, Bandung: Akatiga,
- Soetrisno, Loekman, (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius Yogyakarta.
- Soetrisno, L. (1997). *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, Yogyakarta: Kanisius
- Sumodiningrat, G. (1997). *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Bina Rena Pariwara, Cet. 2
- Suharto, E. Suradi, Luhpuri, D.Sudrajat, A., Koswara, H., Marbun, J., Masngudin & Sabeni, (2003). *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial, Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia*, Bandung: STKS Bandung Press
- Suparlan, P. (1994). *Mempersiapkan masyarakat Pedesaan Menuju Era Industrialisasi* dalam Balitbang Depsos RI, 1994, Pembangunan Yang Terpadu Berkesinambungan,
- Suparlan, P. (1994). *Mempersiapkan masyarakat Pedesaan Menuju Era Industrialisasi dalam Pembangunan Yang Terpadu Berkesinambungan*, Balitbang Depsos RI. 1994.
- Noer,ET. (2000). *Pembangunan, Krisis, dan Arah Reformasi*, Surakarta: Muhammadiyah University Press,
- Tjokrominoto, M. (1996). *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Zastrow, C. (1992). *The Practice of Social Work*, fourth edition, Wadsworth, California.
- Koran:
Media Indonesia (Senin 22 November 2010)